



TESIS

JUDUL:

**EFEKTIVITAS SURAT EDARAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 593/4252/PUOD TAHUN 1990
SETELAH DIBERLAKUKANNYA PERATURAN MENTERI
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN
2020 TENTANG PEMANFAATAN BARANG MILIK
NEGARA TERKAIT PENGELOLAAN ATAU
PEMANFAATAN TANAH YANG DIMILIKI OLEH
PEMERINTAH**

Disusun Oleh:

Gigih Dayu Priambudi

NIM. 207202021

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

2023

Pengesahan

Nama : GIGIH DAYU PRIAMBUDI
NIM : 207202021
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul Tesis : Efektivitas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 593/4252/PUOD Tahun 1990 setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara terkait Pengelolaan atau Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki oleh Pemerintah
Title : -

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
3. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H., Dr.
NIK/NIP: 10208001



Jakarta, 24-Januari-2023
Ketua Program Studi



JEANE NELTJE, S.H.,M.H.,APU.,Dr.,Prof.

Persetujuan

Nama : GIGIH DAYU PRIAMBUDI
NIM : 207202021
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Judul : Efektivitas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4252/PUOD Tahun 1990 setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara terkait Pengelolaan atau Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki oleh Pemerintah


Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 21 Desember 2022

Pembimbing:

Dr. ARIAWAN GUNADI, S.H., M.H.

NIK/NIP: 10208001



KATA PENGANTAR

Assallamu'alaikum Wr Wb

Alhamdulillah Penulis Ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya Tesis ini dengan baik, dan atas kesempatan yang diberikan belajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara serta dalam mencari data-data untuk kepentingan penelitian penulisan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“Efektivitas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4252/PUOD Tahun 1990 setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara terkait Pengelolaan atau Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki oleh Pemerintah”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat kelulusan Program Pascasarjana Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama penyusunan tesis ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;

2. Pror. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., APU., selaku Kepala Program Studi Pascasarjana (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;
3. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan setiap waktu dengan penuh semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
4. Dosen Penguji karena telah meluangkan waktunya untuk membaca Tesis dan memberikan saran serta masukan untuk perbaikan Tesis ini;
5. Marsma TNI Evi Zuraida, S.H., M.H., selaku Kadiskumau yang mengizinkan saya untuk melanjutkan ke program magister;
6. Letkol Pnb Dhian Rahmat Infantoko, saya ucapkan terimakasih telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
7. Dr. Hari Sugiharto, S.H., M.H, terimakasih telah memberikan motivasi , dukungan, saran dan masukan selama Penulis menyelesaikan Tesis ini;
8. Istriku Lisdora Estri Mawangun, S.H., M.Kn, anakku tersayang Mafaza Lovelya Priambudi, adikku dan seluruh keluargaku tersayang yang selalu memberikan dorongan moril serta semangat;

9. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara yang telah membantu Penulis selama perkuliahn di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Akhir kata, kelebihan Tesis ini adalah penelitian mendalam secara faktual seperti apa proses penyelesaian permasalahan yang dapat ditempuh oleh pemerintah, Tesis ini terdiri dari 5 Bab berisikan hasil penelitian penulis. Penulis menyadari bahwa Tesis ini belum sempurna, karenanya diharapkan ini menjadi awal penelitian-penelitian lain untuk dapat memperdalam permasalahan ini. Demikian harapan penulis tesis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan mahasiswa dan praktisi hukum dan para Aparatur Negara pembuat keputusan.

Jakarta, Januari 2023
Penulis,

Gigih Dayu Priambudi

Contents

JUDUL

Persetujuan	ii
KATA PENGANTAR	iii
Abstrak.....	viii
ABSTRACT.....	x

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teori	19
A. Metode Penelitian	21
B. Sistematika Penulisan.....	24

TINJAUAN PUSTAKA

A. Surat Edaran	28
B. Peraturan Perundang-undangan.....	30
C. Tanah Pemerintah.....	44
4. Pendaftaran tanah	66
5. Jenis-jenis hak atas tanah	69

Hasil Penelitian/ kondisi objektif.....

A. Kedudukan surat edaran dalam peraturan perundang-undangan.....	91
B. Prinsip-prinsip hukum	95
A. Konflik norma antar peraturan memakai azas preferensi.....	97
C. Pembentukan peraturan perundang-undangan	102

Analisis data.....

A. Kedudukan PMK dalam peraturan perundang-undangan	119
---	-----

B.	Analisis SE dan menteri keuangan mana yang seharusnya diberlakukan	124
----	--	-----

PENUTUP	152
KESIMPULAN.....	152
DAFTAR PUSTAKA	156

Abstrak

- (A) Nama : Gigih Dayu Priambudi (NIM. 207202021)
- (B) Judul Tesis : Efektivitas Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593/4252/PUOD Tahun 1990 setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara terkait Pengelolaan atau Pemanfaatan Tanah yang Dimiliki oleh Pemerintah
- (C) Halaman :
- (D) Kata Kunci : Pemanfaatan, Pengelolaan, Barang Milik Negara
- (E) Isi Abstrak :

Di era pemerintahan saat ini pemerintah sangat memperhatikan tentang administrasi salah satunya tentang barang milik negara, dimana barang milik negara dibagi menjadi beberapa hal salah satunya barang bergerak dan barang tidak bergerak. Saat ini penulis membahas tentang barang tidak bergerak berupa tanah. Tanah yang dimiliki oleh negara dapat dimanfaatkan dengan syarat dalam pengelolaannya ada pemasukan ke kas negara dan jumlah pemasukan ke kas negara ini penaksirannya langsung di tinjau oleh Kementerian Keuangan dimana aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Namun peraturan yang telah ditetapkan tersebut dalam pelaksanaannya tidaklah berjalan mulus,

misalnya dalam pengelolaan barang milik negara berupa tanah para pemanfaat tidak melaporkan kepada Lembaga atau Instansi yang terkait disinilah pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara menjadi terhambat.

- (F) Daftar Acuan : 14 Buku
14 Jurnal
- (G) Pembimbing : Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H
- (H) Penulis : Gigih Dayu Priambudi

ABSTRACT

- (A) Name : Gigih Dayu Priambudi (NIM. 207202021)
- (B) Title :
- (C) Page :
- (D) Keyword : Utilization, Management, State Property
- (E) Content :

In the current era, the government is very concerned regards to administration, one of which is about state property, where state property is divided into several things; such as movable and immovable property. In this study, the authors discuss about immovable properties in the form of land. The land owned by the state can be utilized on condition which in its management there is income to the state treasury. In addition, the amount of income to this state treasury is directly reviewed by the Ministry of Finance where the regulation is contained in the regulation of Minister of Finance No. 115 of 2020 concerning the Utilization of State Property. However, the regulations which have been set in their implementation didn't work as planned; for example, in the management of state -owned goods in the form of land uses do not report to the institutions or agencies related to the implementation of the utilization of state property to be obstructed.

- (F) Refrence : 14 Book
14 Journal
- (G) Thesis Adviser : Dr. Ariawan Gunadi, S.H.,M.H

(H) Author : Gigih Dayu Priambudi